

SKETSA ELIT DAN FRAGMENT EKONOMI POLITIK KOTA

Akhmad Ramdhon
Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret

Abstract

The city in its development experience dynamics. Relation schema elite is one of the determinants of movement of the city. Note the various cases concerning the pattern of relations between elites also determine the pattern of development of the city, where the economic elite could become the motor for the diverse schedule of change. The dynamics of urban political economy that should open a wide space for the involvement of stakeholders city was experiencing reduction by the elite. Transactions of interest between political interests and economic interests became the largest energy to ensure direction, movement and pattern of change that occurred in the city.

Keywords : *city, elite, economic, politic, social change*

A. Konstruksi Umum

Diskursus tentang kondisi politik kontemporer di negara kita tidak dapat dilepaskan dari berbagai perspektif yang menyertainya, entah itu dalam perspektif yang deterministik ataupun yang plural. Berbagai perdebatan-pun penuh dengan analisa-analisa yang menempatkan politik bersama relasinya dengan variabel-variabel lain entah budaya, ekonomi hingga variabel-variabel yang tidak tampak dalam permukaan seperti tarik ulur kepentingan antara pelaku-pelaku dalam jaring-jaring kekuasaan. Konsekuensi dari kondisi seperti itu melahirkan paradoks dalam setiap perdebatan (dalam bahasa lain, perdebatan yang melahirkan perdebatan lagi) yang ingin menjelaskan kondisi perpolitikan kita secara komprehensif dan kami-pun mengalami dampak dari kondisi itu.

Kedepan menjadi penting untuk memberi penekanan pada relasi antara ekonomi dan politik yang berarasan pada konteks

perkotaan, secara umum dan luas. Banyak referensi juga memberi jalan bagi kami untuk melihat signifikansi perkembangan ekonomi yang berbanding seimbang dengan perkembangan kota. Pada konteks itu kita mencoba menganalisisnya dengan memberi penekanan pada contoh kasus terutama yang ada di negara berkembang dengan menggunakan perspektif yang melahirkan dikotomi antara pelakunya. Sebab dalam perspektif inilah bisa dibedakan konstruksi dari dinamika perpolitikan di negara-negara baik yang sudah maju ataupun negara-negara yang tidak berkembang-berkembang secara ideal untuk diperdebatkan dan ideal karena banyak referensi untuk membedahnya, disamping juga keinginan untuk melihatnya sebagai wacana yang tidak datar namun potensial untuk dieksploitasi.

Dalam banyak wacana sebelumnya, kita melihat ada banyak kristalisasi pemikiran kita terhadap pembangunan kota-kota di berbagai negara, dengan menempatkan

variabel ekonomi sebagai pendorong utama laju pertumbuhan dan perkembangannya. Catatan sejarah bisa mengenal perkembangan kota-kota yang dimulai dari penemuan flying shuttle yang memudahkan proses penenunan, pemintalan dan memudahkan, menambah produksi sekaligus meletakkan pondasi bagi Revolusi Industri di Eropa. Penemuan itu kemudian disusul dengan berbagai penciptaan teknologi baru yang pada akhirnya menyeret arah pola perekonomian klasik ke arah perkembangan ekonomi kapitalistik dengan modal sebagai sandaran utamanya, dan pada akhirnya mengubah wajah kota-kota di Eropa dan belahan dunia yang lain. Oleh sebab perkembangan ekonomi dan berbagai variabelnya menyebabkan over produksi yang menuntut adanya pasar yang bisa mereduksi berbagai produk yang telah tercipta.

Kondisi ini memang tidak begitu saja tercipta namun sudah terkonstruksi sebelumnya dengan berbagai latar belakang socio-historis di Eropa pada saat itu, terutama dengan lahirnya orang-orang yang tidak puas terhadap kondisi masyarakat secara umum, yang dikuasai oleh koalisi otoritas monarkhi absolut dan gereja. Mereka menuntut ada pembaharuan di dalam masyarakat, yang mana mereka anggap stagnan (L. Laeyendecker, 1983 : 13-18). Kondisi yang ada dan berlangsung sesudahnya adalah menggeliatnya kekuatan ekonomi sebagai kekuatan yang merenggut semua variabel yang ada, menjaring semua pelakunya dalam sebuah jaringan global yang tidak menyisakan sedikit ruang-pun bagi individu-individu untuk melakukan penolakan, agar tereduksi di dalamnya. Keadaan seperti ini bertahan dalam satu arah perubahan yang memang secara sengaja diciptakan oleh para pemodal, dengan proses yang berjalan secara cepat, dengan berbagai instrumen yang diciptakan sebagai pelengkap dari eksistensi-nya dan berbagai produk yang tetap menyertakan kita semua dalam

bingkai keterikatan dan ketergantungan yang menyesakkan.

Arah perubahan menempatkan ekonomi sebagai motor utama dan secara otomatis merubah pola kekuasaan yang ada sebelumnya, dimana kekuasaan sebelumnya diletakkan di atas pondasi-pondasi non-ekonomi. Tapi setelah perkembangan kapitalisme menyebar dan menjadi potret besar wajah dunia global maka yang terjadi adalah tarik ulur antar pelaku kekuasaan untuk sebanyak mungkin melakukan akumulasi kapital. Maka dari sinilah analisa untuk menempatkan relasi yang signifikan antara kekuatan ekonomi dengan tegaknya eksistensi kekuasaan. Dan implikasi dari cara berpikir seperti itu mempunyai konsekuensi baru yaitu membuat dikotomi bagi para pelaku politik, atas dasar kepemilikan. Konsekuensi dari paparan tersebut menghasilkan sebuah kategori yang sederhana yaitu menempatkan mereka dalam kerangka relasi antara elit, kelas menengah dan kelas bawah. Relasi yang terbangun diantara mereka adalah dengan menganggap posisi masing-masing secara obyektif-kontradiktif dalam lokasi hubungan kelas. Dimana hubungan antara mereka adalah hubungan *antagonistik*, saling bertentangan satu sama lain dalam kepentingannya masing-masing dan perseteruan mereka terhadap aset-aset ekonomi yang terbatas jumlahnya namun tetap menarik untuk diperebutkan. Anthony Giddens dan David Held, 1987 : 62). Dan tentunya dengan pengabaian terhadap berbagai standart nilai yang ada dan berlaku. Di sini-lah potret yang tampak bukanlah potret yang indah, dengan komposisi keadilan dan kebenaran yang berada pada tempatnya. Namun sebuah potret yang buram yang tidak nyaman untuk disaksikan dalam kerangka moral ataupun nilai-nilai normatif dan diyakini eksistensi nilai-nilai tersebut.

B. Sketsa Elit dan Korporasi-nya

Dalam kondisi modern dimana setiap masyarakat secara otomatis berafiliasi dalam

bingkai negara maka peran akan subyek yang ditempatkan secara khusus sebagai elit adalah orang yang paling banyak 'mempunyai' standart nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini elit kemudian dilekatkan dalam statusnya sebagai subyek yang telah memegang otoritas tinggi ataupun tertinggi dalam masyarakat, untuk menjalankan mekanisme negara (J.W. Schrool, 1980: 128-134). Atau dalam arti yang paling umum, elit itu menunjuk sekelompok orang yang di dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi atau dalam arti khusus orang-orang yang terkemuka dalam bidang-bidang tertentu dan khususnya memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan serta lingkungan dari mana pemegang kekuasaan itu diambil.

Kosekuensinya adalah mengangkat preposisi bahwa kekuasaan ditegakkan oleh ekonomi dan aset-aset ekonomi yang terbatas jumlahnya. Oleh karena itu sudah menjadi konsekuensi yang logis apabila kemudian setiap orang cenderung memperebutkan sejumlah peran utama (elit) dalam kerangka itu, untuk kemudian menciptakan atau mendapatkan fasilitas dalam kerangka mengakumulasi berbagai kapital. Maka yang akan dilakukan oleh setiap subyek yang berusaha dan telah mendapatkannya adalah kecenderungan untuk mempertahankannya dalam waktu yang relatif lama (status quo). Namun juga tidak bisa dipungkiri kalau tuntutan terhadap status itu terlalu besar bagi subyek yang tidak punya kemampuan karena yang akan dihadapinya adalah tuntutan yang terlalu banyak dari masyarakat luas. Tuntutan untuk menempatkan masyarakat pada garda depan takkala membuat kebijakan, tuntutan untuk membuat masyarakat lebih baik, secara ekonomi ataupun politik. Tuntutan-tuntutan itu sudah semestinya ditempatkan sebagai kewajiban atau tugas yang harus dilaksanakan oleh elit. Di samping juga menghadapi berbagai tarikan dari kepentingan yang lain yaitu individu

yang terkait dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh elit, membuat hal ini terasa sebagai buah dari semakin kompleks dan memadatnnya kota, dalam segala aspeknya. Di sini akan terasa sekali bagaimana masing-masing orang berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai kebijakan yang ada, entah keuntungan yang mereka rasakan dari adanya aturan yang tidak begitu mengikat ataupun kelonggaran dalam banyak hal, yang intinya menguntungkan bagi mereka.

Kesadaran dari elit, bahwa mereka tidak bisa berdiri sendiri tanpa ditopang oleh pelaku yang lain, menjadikan mereka membangun kekuatan bersama dalam rangka mengokokohkan kekuasaan itu. Pertanyaannya kemudian, ketika elit sudah mempunyai kekuasaan maka siapa yang akan mereka ajak bergabung, tentunya pihak lain yang mempunyai kekuatan lain dan kekuatan yang mampu menegakkan kekuasaan adalah modal (I. Warsana Windhu, 1992 : 39) Dengan berkoalisi dengan kekuatan modal maka pertukaran keuntungan terbangun diantar keduanya. Bagi para pemilik modal, kebebasan yang mereka dapatkan, kebijakan-kebijakan yang memihak atau jaminan keamanan atas dasar pertemanan adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan begitu saja dengan mudah. Begitu juga bagi para elit, mengelola aliran modal yang masuk kemudian tidak jelas penggunaannya atau modal untuk menjaga tegaknya kekuasaan mereka juga bukan hal yang mudah.

Koalisi antara kekuasaan dan para pemilik modal, sebenarnya lebih disebabkan karena bertemunya para politisi yang lemah dengan para pemodal yang memang tidak punya kemampuan berbisnis dengan baik. Keduanyalah yang kemudian akan membangun kekuasaan menjadi kekuasaan yang tidak mempunyai kepekaan terhadap berbagai tuntutan diluar hubungan keduanya. Mereka dengan serta merta sedang membangun rezim untuk kemudian membuat

berbagai kebijakan yang mendukung apa-apa yang mereka lakukan dan tentunya ujung dari semua itu adalah terpeliharanya kekuasaan yang mereka punyai sekaligus juga mengembangkannya dengan menghambat berbagai gejala perubahan dalam masyarakatnya. Rezim yang ditegakkan atas dua kekuatan itu, biasanya mampu bertahan relatif lama bila dibandingkan dengan rezim yang hanya berbasiskan kekuatan militer saja. Sebab dengan mereduksi kekuatan modal dalam satu bingkai kekuasaan maka dengan sendirinya mereka juga telah mereduksi kekuatan kelas menengah di dalamnya. Karena letak orientasi kelas menengah lebih pada prosesi ekonomi saja, mereka bukan orang yang berobsesi untuk memegang kekuasaan namun juga tidak mempunyai cukup modal untuk memiliki alat-alat produksi, jadi lebih pada kesempatan-kesempatan hidup yang lebih baik secara ekonomis. Harapan dari keadaan seperti ini adalah minimnya keinginan dari kelas menengah untuk melakukan perubahan karena memang biasanya potensi perubahan memang sering kali datang dari kelas ini, terutama yang berpendidikan tinggi. Dengan sendirinya rezim sedang mengkebirikan kelas menengah ini.

C. Konsekuensi ekonomi-politik kota

Sketsa politik yang terurai dalam deskripsi diatas pada akhirnya menyeret juga perubahan dalam struktur masyarakat secara luas, dimana akan lahir kelas yang tidak memiliki kekuasaan baik politik, modal ataupun kemampuan secara ekonomi. Dalam diskursus ini, menempatkan kelas bawah yaitu kelas yang tercipta akibat proses marginalisasi ruang-ruang politik dan ekonomi. Proses ini menghasilkan arogansi kebijakan yang menciptakan tingkat produktivitas yang pincang antara kota dan desa, sedikitnya keterkaitan antara kebijakan dengan berbagai perangkat yang disediakan, *distance* yang luar biasa (antar pelaku ekonomi, desa-kota atau sektor formal-informal) dan ke-

senjangan tingkat pendapatan serta rendahnya tingkat kehidupan masyarakat secara luas (Didik J. Rachbini, Prisma 1991). Padahal kondisi negara kita adalah negara agraris, sedangkan kebijakannya tidak mengarah pada kondisi itu maka yang terjadi adalah melemahnya tingkat perkembangan komoditi pertanian dibandingkan dengan perkembangan komoditi diluar pertanian.

Kondisi terpusatnya kebijakan mengakibatkan membesarnya pergeseran manusia ke arah kota, sehingga meningkat pula proporsi penduduk kota. Akumulasi manusia di kota-kota, yang tidak diimbangi oleh jumlah lapangan kerja pada akhirnya menyebabkan pengangguran yang tinggi, dimana luapan ini kemudian bekerja pada kantong-kantong ekonomi informal, dengan produktifitas rendah dan subsisten. Pada beberapa kasus di beberapa negara (terutama negara berkembang) potret urbanisasi merupakan proses yang berjalan secara terus menerus dan tidak dapat ditekan laju pergerakannya. Ada beragam kekuatan yang menyebabkan proses tersebut berjalan secara simultan oleh sebab dinamika kota yang semakin lanjut, sebagai efek dari adanya kolonialisasi dimana kota tumbuh dan dijadikan pusat konsentrasi atas penguasaan dan pengelolaan daerah jajahan. Dan situasi tersebut masih tetap bertahan sekalipun telah terjadi proses dekolonialisasi. Kemudian teknologi yang tersedia dan hanya dapat diakses di kota-kota semata menyebabkan terpusatnya berbagai inovasi teknologi manusia di ranah kota. Pertumbuhan penduduk secara keseluruhan menunjukkan peran dalam mempertegas pentingnya arti dan makna kota bagi kehidupan. Di negara-negara maju, lalu lintas penduduk dalam negeri atau dari/ke kota menjadi alasan atas tingginya laju urbanisasi disamping meningkatnya jumlah pendapatan di wilayah perkotaan. Berbeda dengan kasus-kasus pada negara-negara berkembang dimana perubahan penduduk secara alami merupa-

kan selisih jumlah antara kelahiran dan kematian yang menjadi variabel dominan untuk mendorong laju urbanisasi (Philip M. Hauser dan Robert W. Gardner, 1985 : 46-52).

Ada banyak paparan tentang kuantifikasi fenomena urbanisasi dan dinamikanya di berbagai belahan dunia. Oleh Peter JM Nas (1979) diurai : pada tahun 1800-an, terdapat 15.6 juta dari 906 juta orang (1,7 %) yang tinggal dan menetap di daerah perkotaan. Dan pada tahun 1960 kenaikan atas meningkatnya jumlah penduduk kota berkisar pada kisaran angka 51.6 juta menjadi 590 juta atau meningkat 20 %. Dimana fakta lain tentang urbanisasi adalah tentang level urbanisasi (presentase jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan dibagi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan) dan pada kasus Indonesia terdapat kenaikan yang konstan -bahkan naik (Achmad Nurmandi, 1999 : 3-12) : 1960 terdapat 15%; 1970 terdapat 17%; 1980 terdapat 22%; dan 1990 terdapat 31%. Pemusatan beberapa sektor kehidupan seperti perdagangan, industri, pendidikan hingga politik menjadi penyebab utama signifikansi angka-angka tersebut (Takayoshi Kitagawa, 1998 : 297). Akibatnya kota makin dinamis dan kompleks atas berbagai hal. Kawasan kota sebagai mekanisme perekonomian secara tidak langsung adalah sebagai konsekuensi dari perkembangan sektor pertanian dimana keberhasilan atas pencapaian hasil pertanian secara maksimal bahkan surplus mampu menstimulasi perkembangan pasar sebagai bentuk transaksi atas pertemuan-pertemuan aktivitas ekonomi. Akumulasi atas kondisi ini menstimulasi pula pengelompokan masyarakat diluar sektor pertanian dan pada saat yang bersamaan industrialisasi melebar. Pembagian kerja dan spesialisasi kemudian menjadi ciri masyarakat kota di samping terstratifikasinya pola pendapatan dan pola konsumsi masyarakat dalam struktur ekonomi berbasis non agraris. Telah terjadi transisi dari ekonomi tradisional ke modern.

Kondisi ekonomi yang mapan membutuhkan pola pengaturan atas berbagai hal dan tata pemerintahan kemudian menjadi jalan keluar atas persoalan ini. Kawasan kota kemudian menjadi satuan-satuan pemerintahan dimana kondisi penduduk makin banyak, persoalan makin kompleks dan kebutuhan makin beragam. Relasi-relasi individual kemudian membutuhkan mediator dan spesialisasi pekerjaan melahirkan profesi bagi sebagian individu untuk mengatur dan menata kota, dengan segala aspeknya. Bangunan organisasi sosial yang terbentuk -sebagai bentuk pengkristalan berbagai perbedaan- menjadi aktualisasi perilaku individu di kawasan perkotaan, selain karakter yang rasional, ekonomis dan dinamis. Kondisi ini juga diikuti oleh dinamika ruang dalam berbagai bentuk dan maknanya dalam lingkungan dan kawasan perkotaan. Pertumbuhan ekonomi dan investasi menyeret pola pendapatan dan pola konsumsi masyarakat dalam ragam-ragam kebaruaran.

Dalam ranah politik, konsekuensi dari dominannya ekonomi kota melahirkan subyek-subyek yang apatis sebab mereka biasanya hanya mempunyai sedikit pengetahuan, hidup dalam segala keterbatasan, minimnya partisipasi dalam lingkungan sosialnya. Sebagai subyek mereka sangat potensial, karena jumlah yang sangat banyak. Namun penghargaan terhadap mereka (dalam kapitalisme-birokratis) tidak sesuai. Mereka hanya dieksploitasi sebagai lumbung-lumbung suara takkala pemilihan umum berlangsung, dalam tuturan Samuel Hungtinton menegaskan, mereka merupakan sumber daya politik yang telah kehilangan daya politiknya untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Potensi ini lebih banyak dimanfaatkan oleh berbagai kelompok kepentingan, terutama rezim yang sedang berkuasa sebab biasanya sikap inferioritas lebih karena dominasi politik yang datang untuk meyumbat dan menyekat partisipasi mereka. Akhirnya semakin ter-

subordinasi, semakin apatis pula mereka. Kelas ini dalam perkembangannya hanya menjadi bumper' pada masyarakat kapitalis. Dan ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga banyak dinegara-negara lain terutama negara yang sedang berkembang, setidaknya nilai-nilai elit politik, elit ekonomi dan kebijakan para penguasa, lebih dominan dan menentukan dari pada yang lain dalam membentuk pola partisipasi masyarakat maupun menentukan arah pengembangan suatu negara (J.E. Goldthrope, 1992 : 392).

Sejarah politik memberi ruang lapang bagi kemapanan sistem politik tradisional yang diikuti dengan hadirnya momentum kolonialisasi. Kolonialisasi yang berwajahkan perdagangan dan militer mengubah secara frontal potret kekuasaan, sekaligus mengubahnya dengan melemahkan makna serta fungsi kekuasaan yang terkonsentrasi pada tradisi sebagai pusat. Kekuatan dan kekuasaan tergerogoti oleh sistem politik yang dikembangkan kaum kolonial dan melahirkan ketertundukkan secara politis kekuasaan dalam bingkai ekonomi, politik dan budaya. Konflik eksternal kaum kolonial untuk melakukan ekspansi ke berbagai wilayah ikut menyeret kekuasaan yang ada dan masuk ke dalam keterbelahan kekuasaan internal raja-raja, yang luar biasa. Kepentingan kolonial untuk mengembangkan sistem ekonomi sebagai bagian dari perdagangan internasional melahirkan kebijakan dan sistem politik yang mengkonstruksi ketergantungan sekaligus mengkebiri kemampuan kebudayaan Jawa. Salah satu kebijakan politik kolonial yang kapitalistik adalah terjadinya reorganisasi berbagai tatanan dalam masyarakat struktur masyarakat Jawa. Berbekal semangat yang tetap kolonialistik, kebijakan untuk rasionalisasi, standarisasi dan pemusatan pada tatanan administrasi kolonial, ditata kembali.

Penghadiran pelaku-pelaku kebudayaan barupun dilahirkan dengan menciptakan alternatif dalam struktur yang feodal, lewat pendidikan. Kebutuhan akan individu yang terdidik menjadi tak terhindarkan ketika kegiatan perdagangan meningkat dengan cepat, angka-angka ekspor meningkat dua kali lipat dan kegiatan tersebut terus mengalami perluasan. Pendidikan menjadi jalan keluar atas kebutuhan memproduksi tenaga kerja yang dibutuhkan bagi kekuasaan baru dan kebutuhan bisnis swasta kolonial serta politik untuk mengawali terintegrasinya modernisasi di Jawa, sebagai perpaduan-persinggungan Barat dan Timur. Lahir elit-elit baru sebagai pelaku politik yang tak berbasiskan tradisi tapi mempunyai latar belakang pendidikan. Mobilitas struktural yang terjadi kemudian mengalami perubahan yang paling awal, yang diikuti oleh perubahan karakter kebudayaan masyarakat kota.

Semua kondisi tersebut menjadi prasyarat terbangunnya semangat kebersamaan dalam bingkai nasionalisme. Bangunan identitas kemudian dikonstruksikan, kebebasan kemudian didengung-dengungkan dan organisasi-organisasi baik politik, pendidikan atau kebudayaan, terus diperbanyak lalu mendiseminasikan semua kesadaran tersebut. Politik sebagai manifestasi semua itu, mengalami dinamika yang luar biasa. Pioner dari semangat pergerakan ini adalah para pemuda hasil pendidikan pada fase kolonialisasi akhir dan meninggalkan kemampuan politik tradisional karena telah mampu menebak arah dan gerak perubahan politik nasional. Gelombang perubahan yang memilih negara sebagai bentuk baru tentang bagaimana kekuasaan diatur dan ditata digunakan- menjadi sangat cepat sekaligus mengakselerasi perkembangan kota diatas rel ekonomi dan politik masyarakat modern.

Daftar Pustaka

- Achmad Nurmandi, *Manajemen Perkotaan*, Lingkaran, 1999
- Adi Sasono dan Sritua Arif, *Ketergantungan dan Keterbelakangan*, LSP, 1984
- Didik J. Rachbini, *Dimensi Ekonomi dan Politik Pada Sektor Informal*, Prisma 1991
- Evers, Hans Dieter, *Urbanisme di Asia Tenggara : Makna dan Kekuasaan Dalam Ruang-ruang Sosial*, YOI 2002
- Hauser, Philip M. dan Gardner, Robert W. *Penduduk dan Masa Depan Perkotaan : Studi Kasus di Beberapa Daerah Perkotaan*, YOI, 1985
- Kitagawa, Takayoshi. *Urbanisasi dan Industrialisasi di Indonesia*, UGM press 1998
- Knox, Paul. *Urban Social Geography : an Introduction*, Longman 1982
- Manning, Cris-Tadjuddin Noer, *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*, Gramedia-PSK UGM 1985).
- Palen, J John. *The Urban World*, McGraw Hill 1987
- Geertz, Clifford. *Mojokuto : Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*, Grafiti, 1986 Goldthrope, JE. *Sosiologi Dunia Ketiga ; Kesenjangan dan Pembangunan*, Gramedia 1999
- Giddens, Anthony dan Held, David. *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai v Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*, Rajawali Pers 1987
- I. Warsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut John Galtung*, Kanisius 1992
- Laeyendecker, L. *Tata, Perubahan dan Ketimpangan* , Gramedia 1983
- Schrool, JW. *Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara Berkembang*, Gramedia 1980